



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MODEL INOVASI

PELAYANAN PUBLIK

BIDANG PENINGKATAN INVESTASI

*Pembelajaran peningkatan investasi melalui
inovasi pelayanan publik*

2023





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MODEL INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENINGKATAN INVESTASI

DISUSUN OLEH:

DR. HENDRI KOESWARA, S. IP, M.SOC.SC

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metode Penyusunan Model.....	5
BAB II FENOMENA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA	7
A. Kondisi Iklim Investasi Indonesia.....	7
B. Fokus Reformasi Birokrasi Tematik dan Kebijakan investasi.....	8
C. Urgensi Inovasi Pelayanan Publik untuk Peningkatan Investasi.....	10
BAB III KONSEP DASAR INOVASI.....	14
A. Konsep Investasi	14
B. Inovasi Layanan Publik.....	16
BAB IV MODEL INOVASI PENINGKATAN INVESTASI	24
A. Aspek Tata Kelola dalam Inovasi Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Investasi.....	24
B. Rekomendasi Kebijakan: Sebuah Rekomendasi Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Investasi	30
BAB V PRAKTIK DAN PEMBELAJARAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG INVESTASI.....	35
A. SiBakul Jogja.....	35
B. Invest Bandung.....	37
C. Klinik BUM Desa.....	39
D. Paket Kebijakan Investasi.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pertumbuhan ekonomi dan persaingan global, berimplikasi kepada pemerintah yang semakin memiliki tanggungjawab strategis dalam menciptakan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan investasi. Mengingat peran penting pelayanan publik dalam membentuk persepsi investor terhadap kestabilan, kepastian, dan efisiensi suatu negara, inovasi dalam pelayanan publik menjadi suatu keharusan. Dalam era globalisasi, negara-negara bersaing untuk menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Kompleksitas tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi, persaingan yang ketat, dan perubahan teknologi yang cepat, memaksa pemerintah harus terus berinovasi dalam menyediakan layanan publik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Inovasi dalam kegiatan pemerintahan lebih mengarah pada pelayanan publik, meskipun inovasi dapat menekankan pada proses, pembangunan, perencanaan, kebijakan, dan kegiatan lainnya. Inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan iklim bisnis dan meningkatkan daya saing nasional. Inovasi ini dapat mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan efisiensi birokrasi. Keniscayaan pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan publik salah satunya disebabkan oleh teknologi yang telah mengubah cara publik berinteraksi dengan pemerintah; warga negara lebih banyak dan mudah untuk mendapatkan informasi; peningkatan ekspektasi publik terhadap layanan yang diberikan; kemampuan pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi; dan organisasi sektor publik memerlukan ide dan gagasan, pendekatan serta cara baru dalam bekerja. Inovasi pelayanan publik diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang ramah investasi. Dan di sisi yang lain, investor cenderung tertarik pada negara yang memiliki regulasi yang jelas, prosedur bisnis yang transparan, dan dukungan pemerintah yang proaktif terhadap perkembangan bisnis.

Pada sisi lain pertumbuhan dan transformasi yang disebabkan oleh globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi, investasi, barang dan jasa. Akibatnya, aparatur birokrasi semakin menghadapi tantangan dan dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Warga negara tidak lagi ditempatkan sebagai obyek, tetapi subyek pembangunan. Implikasi perubahan paradigma ini reformasi birokrasi dan pelayanan sektor publik dengan menempatkan kepuasan dan kepercayaan warga negara sebagai prioritas utama. Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pada tataran inilah, inovasi

pelayanan publik menjadi suatu isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi pemerintah memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan publik seperti para investor terhadap pemerintah pada era dinamis dan berkembang seperti yang terjadi pada era globalisasi saat ini.

Secara teoritis atau praktis, investasi dapat dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat hubungan linear dan berkelanjutan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja bagi masyarakat, karena kebijakan investasi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba mengedepankan kebijakan investasi yang ramah terhadap dunia usaha dan atraktif untuk menarik modal. Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

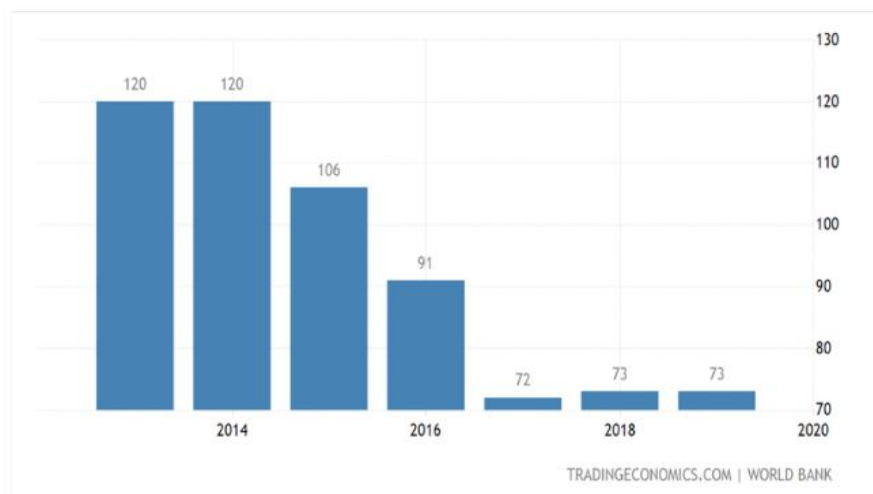
Pemerintah bertanggungjawab dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya para investor. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah baik yang bersifat individual maupun kelompok.

Inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga lebih efektif, efisien, dan memperkuat legitimasi kepercayaan masyarakat. Proses birokrasi yang lamban, korupsi, dan kekurangan infrastruktur adalah beberapa masalah yang membuat layanan publik menjadi lebih buruk saat ini. Maraknya inovasi pelayanan publik menjadi penanda positif yang dapat dibaca sebagai komitmen pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan langkah nyata pemerintah Indonesia dalam melakukan inovasi dalam pelayanan publik untuk mentransformasikan sistem perizinan berusaha menjadi *online*. Ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan usaha, yang menghasilkan pembentukan sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha yang telah terintegrasi dengan lembaga penyelenggara OSS. Sistem OSS dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan jaringan atau sistem satu pintu

yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik.

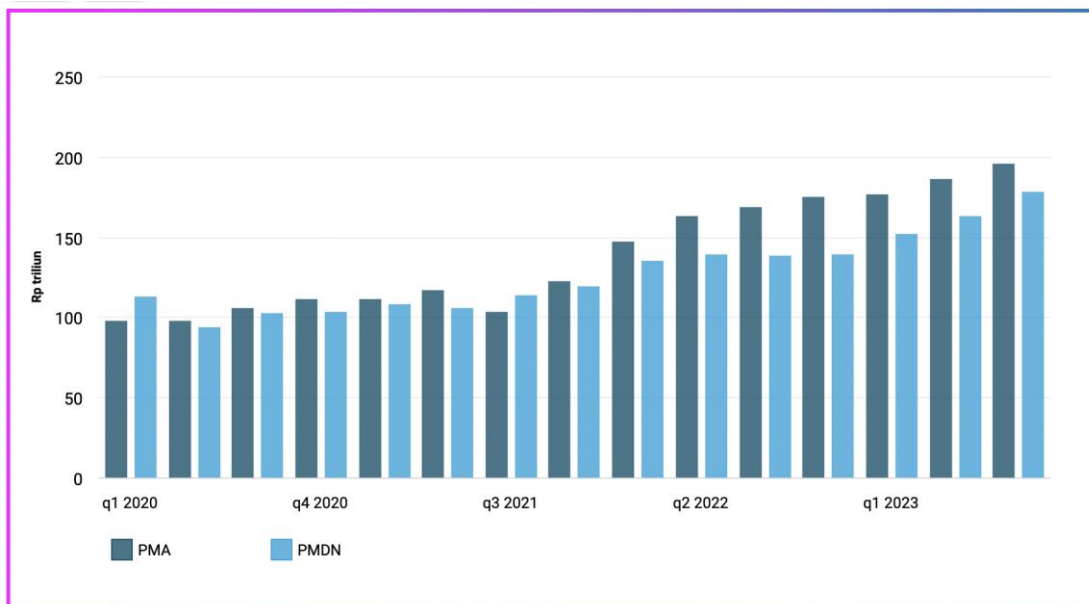
Pelaksanaan OSS dalam rangka menunjang kemudahan berusaha ternyata berkolerasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Bank Dunia dengan berlakunya OSS indikator *starting a business* naik 10 peringkat dari 144 menjadi 34. Walaupun peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) atau kemudahan berusaha Indonesia dalam laporan Doing Business pada Tahun 2019 turun peringkat dari 72 menjadi peringkat 73, namun indeks EODB Indonesia naik 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga sampai saat ini Indonesia tetap berada pada peringkat 73 dalam EODB. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dapat dilihat juga dari gambar berikut:



Grafik 1. Peringkat Kemudahan Berusaha Tahun 2013-2020
Sumber: Trading Economic, 2023

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 terus mengalami perubahan dimana terjadinya kenaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia yakni dari peringkat 120 menjadi peringkat 72 dari 190 negara. Namun, pada Tahun 2018 Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 72 menjadi peringkat ke 73 dikarenakan beberapa indikator mendapatkan skor rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pelayanan publik terutama karena inovasi yang dilakukan tidak signifikan memengaruhi kenaikan investasi di Indonesia. Artinya inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan belum menunjang kemudahan berusaha. Sementara itu, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 328,9 triliun pada kuartal I-2023. Capaian itu tumbuh 16,5% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan secara kuartalan naik 4,5% (quarter-on-quarter/qoq). Realisasi investasi kuartal I-2023 mencapai 23,5% dari target investasi tahun 2023 yaitu

sebesar Rp 1.400 triliun. Sementara itu, pada kuartal I-2023 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi paling besar, yaitu mencapai Rp 177,0 triliun, tumbuh 20,2% secara tahunan (yoy) dan 1,1% secara kuartalan (qoq). Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal pertama tahun 2023 ini sebesar Rp 151,9 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 12,4% secara tahunan (yoy) dan 8,8% secara kuartalan (qoq). Adapun realisasi investasi kuartal I-2023 di luar Pulau Jawa mencapai Rp 172,9 triliun (52,6%), dan di Pulau Jawa Rp 156 triliun (47,4%).



Grafik 2. Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2020-2023
 Sumber: Databoks, 2023.

Karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri, PMA dianggap lebih menguntungkan secara teoretis. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peranan investasi dalam negeri dan luar negeri sangat dibutuhkan. Dengan adanya investasi diharapkan dapat sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sehingga inovasi pelayanan publik dalam proses penyederhanaan perizinan investasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan investasi, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah dengan instansi pada pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, iklim usaha yang kondusif, dan biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Walaupun pertumbuhan investasi terus meningkat setiap tahunnya. Dimana kontribusi investasi selama Tahun 2020-2023 dari Penanaman Modal Dalam Negeri terlihat signifikan di beberapa provinsi di Indonesia. Begitupun juga dengan realisasi

investasi PMA didominasi oleh beberapa provinsi juga di Indonesia. Selain itu terlihat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri lebih besar nilai investasinya dibandingkan nilai investasi PMA. Ironisnya, prestasi tersebut jika dikaitkan dengan kemudahan bisnis pemerintah belum mampu secara signifikan untuk melakukan inovasi pelayanan publik dalam peningkatan investasi. Untuk itu, tulisan ini akan mengurai bagaimana model inovasi pelayanan publik yang dapat secara signifikan memengaruhi investasi di Indonesia baik bagi pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengacu pada aspek teoritik dan praktik terbaik yang dilakukan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Peningkatan Investasi adalah untuk:

1. Menjadi referensi pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk mencapai target RB Tematik khususnya di bidang peningkatan investasi melalui inovasi pelayanan publik
2. Menjadi referensi pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk melakukan penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik terkait peningkatan investasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam tulisan ini yaitu model inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan bidang investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang difokuskan pada aspek tata kelola (*governance*).

D. Metode Penyusunan Model

Penyusunan model inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan bidang investasi yang merupakan sebuah kajian untuk memahami makna individual atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2014). Paradigma interpretif juga digunakan dalam kajian model inovasi pelayanan publik yang berfokus pada pemahaman dan deskripsi fenomena sosial (Neuman, 2014; Rubbin & Babbie, 2008; Holstein & Gubrium, 2009), utamanya dalam peningkatan investasi oleh pemerintah. Lokus Studi ini dilakukan utamanya pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi Pemerintah Daerah yang juga merupakan aktor kebijakan yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peningkatan investasi melalui inovasi pelayanan publik. Kajian dalam merumuskan model inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan investasi ini menggabungkan teknik pengumpulan data primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

Sumber data berasal dari pelbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen terkait (Creswell, 2014), pelbagai sumber data inilah yang dibutuhkan dalam

menghasilkan model inovasi pelayanan dalam upaya peningkatan investasi. Untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih dengan metode purposif (Neuman, 2014), dimana informan kunci tersebut benar-benar terlibat atau memahami permasalahan utama terkait perumus dan implementor kebijakan inovasi dan investasi. Selain wawancara, dilakukan juga observasi untuk mengamati tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh aktor (Creswell, 2015) yang terlibat langsung dalam inovasi pelayanan publik dan investasi.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu: Pertama adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan memahami berbagai bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan karya para ahli yang relevan (Neuman, 2014) yang terkait dengan konsep pelayanan publik, inovasi pada sektor publik, dan investasi. Kedua, studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan objek kajian (Creswell, 2014), antara lain dokumen dan kebijakan yang berkaitan dengan inovasi sektor publik, pelayanan publik dan investasi seperti laporan dan regulasi tentang inovasi pelayanan publik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan dilakukannya penelitian, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Sementara wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan FGD yang dikumpulkan sebelumnya, menulis memo yang pada akhirnya dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan mengatur struktur laporan akhir (Creswell, 2014). Analisis data kualitatif juga dilakukan dengan meninjau kembali semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan yang kemudian menghasilkan abstraksi dengan membuat ringkasan intinya dan menyempurnakan data tersebut (Neuman, 2014). Sementara validasi data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Sebagaimana dimaksud Moleong (2007), triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data; data hasil wawancara mendalam dan hasil FGD akan saling dikonfirmasi satu sama lain, baik antar informan maupun dengan berbagai kajian literatur, studi dokumen, dan arsip tertulis yang terkait dengan fokus kajian dalam merumuskan model inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan investasi oleh pemerintah.

BAB II

FENOMENA INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN INVESTASI DI INDONESIA

A. Kondisi Iklim Investasi Indonesia

Sektor publik adalah sektor yang bercirikan non komersial, berorientasi pada kepentingan umum, berlandaskan pada legitimasi kekuasaan, dan adanya interaksi akuntabilitas dan transparansi antara warga negara sebagai pemberi mandat dengan negara atau pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik. Dinamika tuntutan masyarakat terhadap akses layanan publik semakin luas, hal tersebut ditandai dengan tuntutan kemudahan dalam akses layanan perizinan yang akan memudahkan investor dalam menginvestasikan modalnya di suatu negara atau daerah. Hal ini jelas menuntut inovasi pelayanan dari organisasi sektor publik yang sesungguhnya menghadapi tantangan dan persoalan yang lebih kompleks.

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat serta ditambah dengan berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan informatika menjadikan peningkatan proses *empowering* dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan birokrasi disektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang terjadi di masyarakat.

Penyelenggaraan layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakat sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut.

Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kondisi tersebut dapat diwujudkan hanya dengan mewujudkan layanan publik yang berorientasi pada kemudahan dalam mengakses perizinan investasi di daerah. Akses layanan untuk investor dapat diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik.

Pemerintah saat ini sangat menekankan agar Indonesia menjadi negara yang menarik dan ramah bagi investor. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kebijakan yang menyederhanakan birokrasi dan memangkas regulasi. Penyederhanaan regulasi berdampak pula pada penyederhanaan birokrasi yang

memengaruhi secara signifikan terhadap perizinan berusaha di Indonesia. Kemudahan dalam perizinan berusaha tersebut sejalan dengan salah satu komitmen pemerintah dalam upaya mendongkrak dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun dari target yang diberikan yaitu Rp 1.200 triliun, meningkat sebesar 34% dibandingkan tahun 2021. PMA berkontribusi sebesar Rp 654,4 triliun (54,2%), tumbuh 44,1% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2021. Sedangkan PMDN berkontribusi sebesar Rp 552,8 triliun (45,8%) yang juga tumbuh 23,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 di Luar Jawa lebih besar dibandingkan dengan Jawa yaitu mencapai Rp 636,3 triliun (52,7%) dan tumbuh sebesar 35,9% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2021. Sedangkan realisasi investasi Jawa mencapai Rp 570,9 triliun (47,3%) dan juga tumbuh 31,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara negara asal PMA, Singapura menduduki posisi teratas dengan nilai investasi sebesar US\$ 13,3 miliar (29,1%), kemudian disusul oleh Republik Rakyat Tiongkok di posisi kedua dengan nilai investasi sebesar US\$ 8,2 miliar (18,0%). Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menduduki posisi tiga dengan nilai investasi sebesar US\$. 5,5 miliar (12,1%), disusul oleh Jepang di posisi empat dengan nilai investasi sebesar US\$ 3,6 miliar (7,8%), dan posisi peringkat lima yaitu Malaysia sebesar US\$ 3,3 miliar (7,3%).

Sementara itu, berdasarkan lokasi dengan realisasi investasi tertinggi provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama sebesar Rp 174,6 triliun (14,5%), kemudian Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 143 triliun (11,8%), Sulawesi Tengah sebesar Rp 111,2 triliun (9,2%), Jawa Timur sebesar Rp 110,3 triliun (9,1%), dan Riau sebesar Rp 82,5 triliun (6,8%). Sedangkan untuk masing-masing PMA dan PMDN berdasarkan lokasinya, realisasi PMA terbesar adalah di Sulawesi Tengah sebesar US\$ 7,5 miliar (16,4%) dan realisasi PMDN terbesar adalah di DKI Jakarta Rp 89,2 triliun (16,1%).

B. Fokus Reformasi Birokrasi Tematik dan Kebijakan investasi

Istilah Reformasi Birokrasi memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat maupun pemerintah. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat agar pemerintah segera mereformasi birokrasinya. Birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, berbelit-belit, dan tidak profesional, berbiaya tinggi dan sarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dari sudut pandang publik. Terjadinya kesan negatif dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah/birokrasi diakibatkan karena birokrasi selama ini tidak dapat merespon keinginan warga masyarakat. Konsep lama

birokrasi kemudian dinilai tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga birokrasi tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah tidak dapat diterima oleh konsumen yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat waktu, dan simpel (sederhana). Sehingga reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparaturnya dapat berkualitas lebih baik lagi.

Reformasi birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat presiden untuk menciptakan birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan. Visi yang telah disampaikan oleh pemerintah diharapkan dapat membawa Indonesia dalam menghadapi tantangan fenomenal global yang dinamis, cepat, kompleks, berisiko dan penuh kejutan/fenomena VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Salah satu visi yang disampaikan adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional negara tersebut. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif, dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi.

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di Tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun didalam birokrasi itu sendiri.

Desain besar tersebut membagi *road map* reformasi ke dalam 3 (tiga) tahap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa *Grand Design* Reformasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun, pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum terdapat dampak yang signifikan, sehingga reformasi birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “jalan di tempat”.

Kementerian PANRB merupakan kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu visi Kementerian PANRB yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam usaha peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui arahan Presiden yaitu reformasi birokrasi harus berdampak langsung terhadap masyarakat dan pembangunan, telah di-*launching* Reformasi Birokrasi Tematik yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tahap ketiga ini Kementerian PANRB mencanangkan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). RB Tematik merupakan wujud upaya Kementerian PANRB menerjemahkan arahan presiden agar berdampak langsung kepada masyarakat dan pembangunan. Terdapat empat fokus RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Program prioritas Presiden terbagi menjadi dua, yakni peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian laju inflasi. Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa, dan berdampak di lapisan masyarakat.

C. Urgensi Inovasi Pelayanan Publik untuk Peningkatan Investasi

Governance merupakan kata umum yang diungkapkan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi mewakili kebaruan dalam melakukan sesuatu dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya dalam *governance*. Inovasi lebih lanjut dalam pemerintahan akan merevitalisasi peran kepemimpinan dalam membuat kebijakan dan menguraikan ide-ide baru serta menerapkannya dalam tindakan. Membahas inovasi dalam *governance* terdiri dari banyak unsur seperti pengambil kebijakan, pengelola, warga negara, dan fungsi pelayanan pemerintah. Sederhananya, inovasi mengarah pada bagaimana pemerintah dapat mengelola inovasi dengan cara-cara inovatif yang melibatkan berbagai elemen; tujuannya hanya untuk memberikan pelayanan publik yang baik.

Inovasi tentu tidak tanpa hambatan. Terkait inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan investasi, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam inovasi. Beberapa faktor berikut harus dapat menjadi perhatian, yaitu:

1. Budaya *risk aversion* adalah budaya yang tidak menyukai risiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala risiko, termasuk risiko kegagalan. Sektor publik, khususnya birokrat cenderung enggan berhubungan dengan risiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan risiko minimal. Selain itu, secara kelembagaanpun, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya. Hal inilah yang

seringkali menyebabkan minimnya inovasi dalam proses investasi, sehingga tidak berdampak pada daya ungkit penanaman modal di suatu negara atau daerah.

2. Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi *follower*. Dalam konteks investasi, di beberapa kasus baik di negara maupun dalam konteks daerah hal ini sangat berpengaruh, ketergantungan terhadap pimpinan dan kepemimpinan seseorang atau figur tertentu sangat memengaruhi tingkat investasi, pergantian kepemimpinan berdampak pada kenaikan atau penurunan investasi, belum terdapat konsistensi dan menjaga *legacy* yang baik dalam investasi menjadi persoalan tersendiri.
3. Anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel. Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi. Begitupun juga dalam konteks investasi, seringkali terbenturnya inovasi ada pada proses anggaran dan administratif serta kerumitan pada proses bisnis pada suatu organisasi sektor publik.

Fenomena kegiatan inovasi pemerintah seringkali bertujuan pada pelayanan publik. Inovasi tidak diukur secara tepat hanya sebagai perubahan media dalam penyampaian layanan publik, namun inovasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik lebih efektif dan efisien. Inovasi seringkali dipandang sebagai cara baru yang lebih baik dari cara sebelumnya (Arundel & Huber, 2013). Dalam pemerintahan, inovasi juga diharapkan dapat memecahkan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme dan berkontribusi terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik akan meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inovasi pemerintah seringkali dikaitkan dengan proses perubahan antara penyedia layanan dan pengguna. Perubahan tersebut juga harus mempertimbangkan proses, dampak, dan hasil inovasi. Selain tata kelola, inovasi dapat masuk dalam bentuk perubahan. Oleh karena itu, inovasi tata kelola menjadi salah satu cara mengelola aktivitas pemerintahan di dunia yang selalu berubah (Scupola & Zanfei, 2016). Di sisi lain, terdapat pandangan terhadap inovasi sektor publik yang memerlukan anggaran pemerintah yang tidak sedikit.

Inovasi dalam upaya peningkatan investasi dengan memperbaiki proses pelayanan publik merupakan proses mengelola inovasi di suatu negara atau daerah agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mewujudkan sebuah sistem yang berdaya guna untuk memudahkan proses bisnis sehingga menciptakan keunggulan sebuah negara atau daerah untuk bersaing dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan masuknya permodalan ke suatu negara atau daerah. Pada prinsipnya, sama dengan inovasi pelayanan publik pada kegiatan investasi juga

memerlukan ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Di sinilah inovasi itu harus berperan penting. Adapun alasan mengapa inovasi sektor publik merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan adalah antisipasi dan konsekuensi atas keadaan sebagai berikut:

1. Demokratisasi. Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati batas-batas kedaulatan, ideologi dan politik bangsa-bangsa.
2. Perjanjian internasional/*glocalization*. Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan interaksi antar bangsa dalam rangka kerjasama.
3. *Brain drain*. Fenomena *human capital flight* yang terjadi dari negara berkembang ke negara maju, sehingga terjadi ketidakseimbangan persebaran sumber daya manusia yang unggul. Alhasil kesenjangan sosial ekonomi politik antara negara maju dengan negara berkembang makin melebar.
4. Negara pasca konflik, demokrasi dan ekonomi transisi, Beberapa negara baru saja melewati masa konflik dan instabilitas politik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri. Saat ini mulai mengadopsi sistem demokrasi serta mengalami transisi
5. Moral pegawai negeri, Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penataan birokrasi yang lebih baik.
6. Sumber baru persaingan: privatisasi dan *outsourcing*, Privatisasi dan *outsourcing* adalah fenomena organisasional yang telah merambah sektor publik sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan struktur, budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi.

Inovasi diperlukan di sektor publik untuk menciptakan iklim ramah investasi karena ide-ide segar akan terus lahir yang pada akhirnya berimplikasi pada perbaikan kinerja organisasi sektor publik. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemrawutan. Inovasi yang harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan ini memerlukan suatu sistem untuk mengatur ide-ide ini agar lebih terstruktur. Tanpa adanya manajemen yang baik, ide-ide itu malah akan menumpuk dan kemungkinan akan terlambat untuk diperkenalkan di publik atau pasar. Terlambat diperkenalkan di publik atau pasar maka akan kehilangan pendapatan sehingga makin lama akan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain.

Pada sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, investasi, barang dan jasa, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Pada tataran inilah, inovasi pelayanan publik di daerah menjadi suatu isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan

masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat investor kepada pemerintah daerah.

BAB III

KONSEP DASAR INOVASI

A. Konsep Investasi

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan globalisasi telah membawa dampak signifikan pada ekonomi global. Negara-negara di seluruh dunia bersaing untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Dalam konteks ini, inovasi dikenal sebagai faktor kunci yang dapat membantu negara-negara meningkatkan daya saing ekonomi mereka (Yurynets dkk., 2015) Di tingkat internasional, studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat inovasi yang tinggi memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat. Negara-negara tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih canggih dan inovatif, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja baru (Krammer, 2017).

Namun, di tingkat nasional, masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing ekonomi. Salah satu tantangan adalah rendahnya tingkat pengeluaran untuk R&D dan inovasi terutama pada sektor publik. Selain itu, kekurangan infrastruktur, kurangnya pendidikan dan pelatihan, serta peraturan yang kurang jelas juga dapat menghambat kemajuan inovasi dan daya saing ekonomi. Inovasi telah menjadi kunci penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada abad ke-21 ini. Inovasi dapat merangsang terciptanya produk dan layanan baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam konteks ekonomi global (Halim, 2020).

Dalam konteks Indonesia, inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi. Dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, inovasi dianggap sebagai salah satu kunci utama. Oleh karena itu, kajian mengenai peran inovasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Inovasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan produk dan layanan baru, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja baru. Investasi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan sejumlah uang yang merupakan berupa keuntungan dari modal yang ditanamkan pada periode tertentu. Haming dan Basalamah mengemukakan pendapatnya yakni, investasi adalah pengeluaran dengan mengumpulkan barang modal sekarang untuk menghasilkan produksi barang dan jasa selama lebih dari dua tahun untuk mendapatkan profit yang lebih besar di masa depan (Haming & Basalamah, 2010).

Selanjutnya Tandelilin (Budiarto&Susanti, 2017) beranggapan bahwa investasi adalah keterikatan terhadap sejumlah besar dana atau sumber daya lain yang sedang dibuat, dengan tujuan menghasilkan banyak uang di masa depan. Sedangkan Warsini

dalam (Maimunah & Hilal, 2014) beropini bahwa investasi merupakan kegiatan menanamkan modal ataupun menanamkan dana yang dilakukan di masa kini untuk meraih keuntungan dimasa yang akan datang. Berdasarkan pada pendapat para ahli tersebut, dapat dikonklusikan bahwa investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dimasa sekarang agar mendapatkan keuntungan dimasa depan. Kemudian seorang yang menanamkan modal disebut dengan investor atau penanam modal yang terbagi menjadi dua yakni Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). PMDN merupakan penanam modal dan melakukan usaha di dalam negeri, sedangkan PMA ialah penanam modal asing yang melakukan usahanya di Indonesia. Pada dasarnya jenis investasi dapat digolongkan menjadi dua menurut Jogiyanto (2010), yakni:

1. Investasi Langsung. Investasi langsung berarti memiliki sekuritas yang secara langsung dapat dipasarkan ke badan publik formal dan tentunya mengharapkan keuntungan dalam bentuk pengembalian ekuitas. Intinya berupa investasi jangka panjang.
2. Investasi Tidak Langsung. Investasi tidak langsung ialah apabila sekuritas diperjual belikan kembali oleh perusahaan investasi yang bertindak sebagai perantara. Sederhananya, investasi ini dilakukan dengan membeli sekuritas dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset keuangan perusahaan lain. Biasanya dapat dilakukan dalam bentuk kepercayaan investasi.

Secara umum, investasi memiliki makna suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut di masa yang akan datang. Menurut Tandililin (2010), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Kemudian menurut Sutha (2000), investasi didefinisikan dengan menempatkan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif.

Investasi merupakan penambahan barang modal secara *netto* yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi *riil* dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi *riil* adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya.

Sementara pandangan Kawengian dalam Dewi (2009), investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Tujuan utama investasi ada, yaitu mengganti dari penyediaan modal yang ada. Adanya investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing (PMA)

maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja hingga proses produksi menjadi produktif.

Disisi lain, melalui investasi juga berimplikasi pada meningkatkan kualitas hidup. Inovasi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Memperkuat visi dan misi negara: Dalam konteks Indonesia, inovasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong tercapainya visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Oleh karena itu, memahami peran inovasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi sangatlah penting untuk memperkuat visi dan misi negara tersebut. Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saingnya di pasar global. Menurut Global Competitiveness Index 2021 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat 56 dari 140 negara dalam hal daya saing ekonomi. Meskipun meningkat dari peringkat 62 pada tahun sebelumnya, Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia adalah inovasi. Dalam konteks Indonesia, inovasi menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi. Dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045, inovasi dianggap sebagai salah satu kunci utama. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonominya di pasar global (Purnomo, 2016; Santoso et al., 2021).

B. Inovasi Layanan Publik

Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dapat dilihat dari banyak perspektif. Roger (2019) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Pendapat lain tentang inovasi dikekumakan oleh Albury (2005) bahwa inovasi merupakan kreasi dan implementasi baru pada aspek proses, produk, pelayanan dan metode penyampaian yang memiliki implikasi dampak yang signifikan pada efektivitas, efisiensi dan kualitas. Sedangkan dalam Damanpour dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Menurut para ahli kajian inovasi sektor publik, dengan penekanan pada tipe, jenis, dan karakteristik dari inovasi yang dihasilkan itu sendiri, inovasi dikategorikan menjadi 3 bentuk, yaitu: inovasi pelayanan, produk, kebijakan; proses atau inovasi organisasi; dan tata kelola pemerintahan. Istilah inovasi sebagai sebuah proses dinamis yang mana masalah didefinisikan, ide kreatif dikembangkan, dan solusi baru dipilih untuk diimplementasikan. Selain itu, inovasi juga dimaknai sebagai adaptasi ide dan solusi baru dari pemerintah sebagai sektor publik (Chen et al., 2020; Queyroi et al., 2020).

Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dapat mengadopsi inovasi melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Initiation** atau perintisan. Tahapan perintisan terdiri atas fase *agenda setting* dan *matching*. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan *agenda setting* ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya *performance gap* atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi.
2. **Matching** atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan *feasibilities* atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.
3. **Implementation** atau pelaksanaan. Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses *re-invention*, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi. Pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisikan masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.
4. **Fase Klarifikasi**. Fase klarifikasi terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena memengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan.
5. **Fase Rutinisasi**. Fase rutinisasi adalah fase dimana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi (Kristian dkk, 2022).

Indonesia dihadapkan pada 3 (tiga) masalah utama dalam pelayanan publik saat ini, yaitu (1) birokrasi yang masih gemuk, lamban, dan belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat; (2) korupsi, banyaknya penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara; dan (3) infrastruktur yang tidak

memadai, kurangnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan (Kurniawan, 2016). Untuk itu, perbaikan layanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi sangat perlu dilakukan dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, melayani, serta kompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tolok ukur yang paling mudah dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan kesempatan kepada publik untuk menilai, menolak, dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2013). Untuk itu kualitas pelayanan publik baik di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, Kementerian PANRB telah menetapkan kebijakan tentang inovasi pelayanan publik sejak Tahun 2014, sehingga ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja atau metode pelayanan publik dapat memacu kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Disini letak penting sebuah inovasi pelayanan publik.

1. Kategori Inovasi

Inovasi dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Terdapat dua kategori inovasi yang disebutkan oleh Muluk (2008), yaitu *sustaining innovation* (inovasi terusan) dan *discontinues innovation* (inovasi terputus). *Sustaining innovation* merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan atau produk yang sudah ada. Sementara *discontinues innovation* merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Adapun kategori inovasi yang dijelaskan oleh Halvorsen dkk (2005), terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. *Incremental Innovations* dan *Radical Innovation* merupakan pengkategorisasian inovasi yang memfokuskan pada keaslian maupun kebaruaran (*novelty*) dari inovasi tersebut. Pada sektor industri sendiri inovasi pada umumnya bersifat perbaikan secara inkremental atau secara sedikit-sedikit;
- b. *Top-down Innovations* dan *Bottom-up Innovations* merupakan pengkategorisasian inovasi berdasarkan siapa yang menjadi poros dalam

- proses inovasi. *Top-down* dapat diartikan sebagai pimpinan dan level *top management* lainnya, sementara *bottom-up* merupakan pegawai atau *middle management* lainnya yang memiliki kewenangan mengambil Keputusan;
- c. *Needs-led Innovations* dan *Efficiency-led Innovation* merupakan pengkategorisasai inovasi berdasarkan tujuan inovasi. inovasi bertujuan untuk menjadi solusi dari permasalahan yang sedang terjadi dalam pelayanan serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, prosedur pelayanan maupun produk dari layanan tersebut.

2. Level Inovasi

Level inovasi merupakan gambaran variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang sedang berlangsung. Mulgan & Albury dalam Muluk (2008) menjelaskan level inovasi sebagai berikut:

a. Inovasi Inkremental

Merupakan inovasi yang berupa adanya perubahan sedikit demi sedikit pada proses maupun layanan yang ada. Pada dasarnya inovasi-inovasi yang ada pada level ini tidak banyak yang memberikan perubahan pada struktur organisasi maupun hal-hal yang berhubungan dengan keorganisasian. Inovasi inkremental ini memberikan peran penting pada pembaruan di sektor publik karena memberikan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara terus menerus, dan mendukung pelayanan-pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung nilai tambah uang (*value for money*).

b. Inovasi Radikal

Merupakan inovasi yang berupa adanya perubahan yang sangat baru dalam proses organisasi maupun dalam pelayanan. Inovasi radikal ini pada dasarnya jarang dilakukan, hal ini disebabkan karena akan membutuhkan dukungan politik yang cukup besar dan memiliki risiko yang besar pula, inovasi ini diperlukan karena membawa perbaikan yang nyata pada kinerja pelayanan untuk masyarakat dan dapat memenuhi keinginan pengguna layanan yang lama terabaikan.

c. Inovasi Transformatif

Merupakan inovasi yang memberikan perubahan pada struktur kerja dan keorganisasian dengan mentransformasikan semua sektor dan hal ini menyebabkan adanya perubahan hubungan dalam organisasi. Inovasi Inovasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memperoleh hasil yang ingin dicapai dan membutuhkan perubahan yang mendasar dalam susunan sosial, organisasi dan budaya.

3. Tipologi Inovasi

Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008) mengatakan bahwa inovasi yang dikatakan berhasil adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan yang bersifat baru yang merupakan dalam hasil pengembangan nyata dari segi hal efisiensi, efektifitas maupun kualitas dari yang dihasilkan. Tipologi inovasi sektor publik menurut Muluk adalah sebagai berikut.

a. Inovasi Produk Layanan

Inovasi dalam produk layanan yang dilakukan perubahan adalah desain dan bentuk dalam hal produk layanan yang baru maupun memperbaiki yang sudah ada. Inovasi yang mengalami perbaikan atau modifikasi pada dari layanan yang ada sebelumnya dapat dikatakan sebagai inovasi produk layanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kualitas maupun fungsi dari layanan yang disediakan. Produk layanan yang tersedia dapat berupa layanan barang (fisik) dan layanan jasa (non fisik). Inovasi produk layanan terdiri dari:

- 1) Perubahan Bentuk. Perubahan bentuk layanan termasuk salah satu bagian dalam inovasi produk layanan. Perubahan ini tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi swasta, tetapi juga organisasi publik. Perubahan bentuk disini tidak hanya bersifat fisik (barang) tetapi juga tidak menutup kemungkinan dalam perubahan bentuk non fisik (jasa). Contoh perubahan bentuk yang dilakukan dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat berupa pengurangan dan penambahan produk layanan yang tersedia dengan tujuan meningkatkan pelayanan.
- 2) Desain Produk Layanan. Desain dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kerangka bentuk atau rancangan. Sedangkan desain produk layanan merupakan suatu proses yang dibuat atau diciptakan oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan itu sendiri.

b. Inovasi Proses Layanan

Proses dalam pembuatan suatu produk dan jasa atau dalam penyampaian kepada pelanggan akan memakan biaya, waktu dan tenaga. Baik itu bagi yang menyediakan produk layanan maupun yang menggunakan produk layanan tersebut. Pada produk dan jasa yang tidak efisien maka akan mengalami keterlambatan dalam memasuki pasar dan juga membuat biaya operasional menjadi tinggi. Selain itu, bagi pengguna produk dan jasa mereka mengeluhkan lambatnya pelayanan yang diberikan. Keluhan yang berasal dari pengguna tersebut merupakan sebuah biaya emosional bagi mereka. Berdasarkan penjelasan Muluk bahwa inovasi proses pelayanan berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi

dalam perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi dalam layanan:

- 1) Perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses yang terjadi pada suatu organisasi melakukan suatu perubahan dari kondisi sekarang menuju ke kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan efektifitas maupun efisien dari organisasi tersebut. Tujuan diadakannya perubahan tersebut adalah untuk mencari cara-cara terbaru yang lebih berkualitas ataupun melakukan perbaikan dalam menggunakan *resource and capabilities* dengan tujuan meningkatkan kemampuan atau skill dari organisasi tersebut dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang lebih baik kedepannya kepada *stakeholders*.
- 2) Perubahan Prosedur. Prosedur adalah salah satu momen kritis yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan. Dengan kata lain, Prosedur dapat diartikan sebagai tata cara dalam pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan yang dibakukan kepada pelanggan yang menggunakan pelayanan tersebut. Perubahan prosedur adalah perubahan yang dilakukan dalam serangkaian aksi yang spesifik, tindakan yang harus dilaksanakan dengan tata cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dalam keadaan yang juga sama. Dalam kaitannya terhadap administrasi kependudukan diperlukan suatu perubahan dalam tata cara prosedur yang telah diterapkan agar inovasi yang dijalankan dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan dari inovasi pelayanan publik tersebut.
- 3) Perubahan Kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Perubahan kebijakan dibutuhkan dalam inovasi proses layanan untuk melakukan inovasi. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan suatu inovasi maka diperlukan perubahan kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan inovasi untuk menciptakan tentang perubahan kebijakan dalam prosedur pelayanan dibutuhkan kebijakan dari pembuat kebijakan.

c. Inovasi Metode Layanan

Menurut KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai sehingga memudahkan pelaksanaan yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, inovasi metode layanan merupakan sebuah perubahan tata cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar lebih meningkat dalam hal pelayanan. Muluk (2008) mengatakan bahwa Inovasi metode layanan adalah perubahan baru yang dilakukan oleh penyedia

layanan dalam berinteraksi dengan pengguna layanan atau suatu cara yang baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

- 1) Perubahan baru dalam berinteraksi, Interaksi adalah proses yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lain yang berhubungan satu sama lain. Dalam contoh pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat melakukan interaksi langsung petugas penyedia layanan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan. Interaksi yang dilakukan tersebut adalah interaksi antara individu dengan kelompok.
- 2) Cara baru dalam memberikan pelayanan. Berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka diberikan pelayanan sepenuh hati yang memerlukan usaha untuk menciptakan atau membuat cara-cara baru yang lebih efektif, efisien dan berkualitas. Cara baru yang diberikan penyedia layanan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan cara baru dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan yaitu dengan melakukan perubahan metode layanan dengan cara yang berlaku sebelumnya.

d. Inovasi Kebijakan

Walker (dalam Levi-Faur, 2016) mengatakan bahwa Inovasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, tanpa melihat seberapa lama kebijakan atau seberapa banyak negara lain yang telah mengadopsi sebelumnya. Dengan banyaknya masalah mendasar yang terjadi pada pengurusan dokumen kependudukan maka diperlukan inovasi kebijakan agar peningkatan kualitas pelayanan dapat terjadi. Inovasi kebijakan mengarah kepada visi misi, tujuan, dan strategi baru yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam membuat atau merubah kebijakan beserta alasan yang berangkat dari realitas yang ada.

e. Inovasi Sistem

Merupakan interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang melakukan perbaruan dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan yang dilakukan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*). Pemahaman terhadap interaksi sistem dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut KBBI, sistem merupakan suatu cara teratur untuk melaksanakan sesuatu. Interaksi sistem mencakupi tentang tata cara baru dalam interaksi dengan aktor-aktor lain. Interaksi sistem yang terjadi

tidak hanya sebatas melalui aplikasi melainkan juga interaksi yang dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam inovasi pelayanan dalam mencapai tujuan dari pelayanan tersebut.

- 2) Adanya tata kelola pemerintahan yang baik. *Good Governance* menyangkut dengan hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang baik menjadi prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan. Prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan yaitu masyarakat secara baik (prima).

Sementara itu berdasarkan regulasi dan kebijakan yang ada, melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Inovasi menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dilihat sebagai suatu proses terobosan dan kreatif dan tidak selalu merupakan sesuatu yang baru. Inovasi pelayanan publik juga dapat merupakan modifikasi dari inovasi yang sudah ada untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

MODEL INOVASI PENINGKATAN INVESTASI

A. Aspek Tata Kelola dalam Inovasi Pelayanan Publik dalam Upaya Peningkatan Investasi

Investasi telah menjadi katalisator pada pembangunan nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat. Program RB Tematik peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Instansi pemerintah dapat memilih tema peningkatan investasi dari beberapa tema RB Tematik. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemilihan tema antara lain mandat RPJMN/D, arahan pimpinan instansi, atau kondisi urgen lain (potensi tingginya peluang investasi daerah namun minim realisasi) yang menjadikan tema peningkatan investasi menjadi isu yang semakin penting untuk dikelola dengan baik.

Tata kelola yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung dan dapat diandalkan untuk inovasi pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi. Tata kelola yang baik menciptakan kepercayaan di antara investor. Investor akan lebih cenderung berinvestasi jika mereka yakin bahwa pemerintah memiliki tata kelola yang kuat dan efektif dalam mengelola memberikan pelayanan publik. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan untuk berinvestasi. Dalam konteks inilah inovasi diperlukan dengan menggunakan pendekatan tata kelola dalam pengelolaan investasi.

Dalam melakukan inovasi pelayanan publik aspek tata kelola telah menjadi penentu kesuksesan investasi. Aspek tersebut sangat relevan dengan RB Tematik yang diusung oleh pemerintah. Beberapa aspek dalam tata kelola yang bisa menjadi lokus atau fokus dari inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam konteks investasi, adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

Perbaikan dalam proses perencanaan baik perencanaan kinerja, anggaran dan dokumen perencanaan merupakan aspek penting yang mesti diperhatikan dalam inovasi. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah pondasi yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan inovasi dalam pelayanan publik. Hal Ini sangat membantu mengatasi tantangan finansial, menetapkan visi yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan publik. Perencanaan jangka panjang dan anggaran yang stabil mendukung inovasi berkelanjutan. Ketika sumber daya dialokasikan secara konsisten

untuk program inovasi, pelayanan publik dapat terus berkembang dan meningkat seiring waktu. Inovasi perlu ditopang oleh anggaran yang proporsional dalam rangka menjaga keberlangsungan inovasi, terlebih bagi inovasi yang memang memerlukan dana dalam kegiatannya. Dukungan anggaran menjadi salah satu indikator yang berdampak terhadap keberhasilan inovasi. Ketersediaan anggaran untuk inovasi pada dasarnya dapat berasal dari berbagai sumber yang sah secara hukum. Artinya, sebuah inovasi tidak harus terus bergantung pada anggaran daerah, apalagi daerah dengan anggaran terbatas. Pemerintah dapat mencari sumber anggaran melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sektor privat. Apalagi, perusahaan memiliki kewajiban sosial berupa kucuran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Namun, dukungan anggaran dari pemerintah lewat APBD bukan berarti tidak penting. Inovasi yang dianggarkan secara khusus dari APBD merupakan salah satu wujud komitmen dan dukungan kepala daerah untuk mengembangkan inovasi yang ada. Apalagi jika inovasi tersebut telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Mahpudin, 2022).

2. Aspek Proses Bisnis

Aspek bisnis proses sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan memahami dan meningkatkan cara kerja organisasi, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perhatian terhadap hal teknis yang memerlukan perbaikan dapat diakomodir dalam aspek proses bisnis. Perhatian terhadap bisnis proses akan sangat membantu pemerintah dalam proses identifikasi dan optimalisasi proses-proses yang terlibat dalam layanan publik apalagi dalam upaya peningkatan investasi. Dengan melakukan analisis dan perbaikan terhadap proses-proses ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan menyediakan layanan dengan cara yang lebih efektif.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, terlibat, dan didukung oleh budaya organisasi yang inovatif adalah elemen penting dalam menggerakkan inovasi pelayanan publik. Dengan memberdayakan SDM, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ide-ide baru dan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Pemenuhan kuantitas serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di pemerintah adalah kunci untuk mengembangkan inovasi. Pelatihan dan pengembangan keterampilan pegawai pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kreatif, mengidentifikasi solusi baru, dan mengimplementasikan inovasi dalam layanan publik. SDM yang terampil dalam manajemen perubahan dapat memfasilitasi transisi yang lebih mulus dan membantu meminimalkan resistensi terhadap perubahan sebagai konsekuensi dilakukannya inovasi.

4. Aspek Teknologi Informasi

Teknologi Informasi berkontribusi secara signifikan pada inovasi pelayanan publik dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi teknologi yang cerdas dapat menciptakan transformasi positif dalam penyediaan layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Teknologi industri yang baik dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu, teknologi informasi menciptakan landasan untuk inovasi yang terus-menerus. Kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru memungkinkan pemerintah untuk terus memperbarui dan meningkatkan layanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

5. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan memiliki peran krusial dalam inovasi pelayanan publik. Pengawasan adalah bagian integral dari siklus inovasi pelayanan publik. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara inovasi yang progresif dan perlindungan kepentingan masyarakat serta prinsip-prinsip etika dan keadilan. Penguatan pengawasan melalui *four life of defense* (Manajerial, Fungsional (Internal-Eksternal), Pengawasan Masyarakat), disamping itu pengawasan membantu memastikan bahwa inovasi pelayanan publik mematuhi aturan, peraturan, dan standar keamanan yang berlaku. Ini penting untuk melindungi data masyarakat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Dengan adanya pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa inovasi memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Ini menciptakan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap inisiatif pelayanan publik yang inovatif.

Pemerintah dapat memilih diantara aspek-aspek tata kelola ini sebagai acuan untuk melakukan inovasi dalam layanan publik yang akan diberikan. Aspek ini dapat juga memberikan inspirasi untuk melakukan pembenahan terhadap layanan publik yang bermasalah. Aspek tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya, pemerintah dapat melakukan pembenahan sekaligus dapat melakukan inovasi terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Dan, pemerintah dapat memilih salah satu aspek saja sebagai lokus dan fokus untuk dilakukan pembenahan terlebih dahulu dengan membuat sebuah inovasi agar proses pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Institusi pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing ekonomi dan pembangunan sosial suatu negara. Pendefinisian ulang hubungan antara pemerintah dan masyarakat suatu negara dijumpai oleh pelayanan publik. Pemerintah menentukan bagaimana masyarakat dan dunia usaha berinteraksi sehingga memerlukan inovasi dalam layanan publik. Kondisi ideal iklim investasi ini akan menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi atau menghambat pembangunan dan pertumbuhan

berkelanjutan. Hal ini tentu juga memengaruhi lingkungan bisnis dan daya saing suatu negara, dan dapat menjadikan investor lebih atau kurang tertarik untuk berinvestasi. Daya saing suatu negara tidak lagi didasarkan pada keunggulan faktor statis, melainkan “menyediakan lingkungan di mana pelbagai usaha produktif dapat beroperasi dengan optimal dan terus berinovasi serta meningkatkan cara mereka bersaing ke tingkat yang lebih canggih, sehingga memungkinkan peningkatan produktivitas. Sehingga penting bagi pemerintah untuk mengartikulasikan kebutuhan masyarakat secara baik, cepat, dan tepat.

Disamping itu, terdapat dua faktor pendorong utama dalam inovasi yaitu *able people* dan *agile process* bagi pengembangan fokus dan lokus tata kelola inovasi, yang dikerangkai juga oleh model kebijakan publik yang adaptif. Upaya untuk berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir lintas batas, yang kemudian tertanam dalam aspek tata kelola inovasi akan memiliki dan mempunyai jalur strategi, kebijakan, dan program yang dipilih. Pendekatan mereka terhadap jalur berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dinamis dominan yang digunakan. Dalam berpikir ke depan, konsep-konsep baru dikembangkan dari pemahaman dampak ketidakpastian di masa depan dan dari mempertanyakan asumsi-asumsi implisit. Jika dipikir-pikir lagi, status quo kinerja saat ini ditantang untuk mengidentifikasi perubahan guna perbaikan. Dalam pemikiran menyeluruh, inovasi dihasilkan dari penyesuaian pengalaman dari konteks lain agar sesuai dengan keadaan lokal.

Komitmen dan investasi jangka panjang dalam mengembangkan *able people* dan *agile process* diperlukan untuk mempertahankan inovasi. Hal ini akan mendorong konseptualisasi, tantangan dan penyesuaian terus-menerus yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan publik untuk belajar, mengadaptasi inovasi yang telah ada dan terdapatnya kebijakan yang adaptif, seiring dengan lingkungan yang terus berubah. Sistem hubungan yang saling bergantung antara kemampuan berinovasi pada aspek tata kelola, proses yang dinamis dan kemampuan parapihak yang semakin unggul, baik pemerintah maupun publik dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Inilah inti dari tawaran model inovasi pelayanan publik dalam peningkatan investasi yaitu dengan memerhatikan banyak dimensi yang akan mewujudkan inovasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh publik.

Agile process diperlukan untuk menyelesaikan berbagai hal secara terkoordinasi dan konsisten, baik hal yang bersifat rutin ataupun tidak, perumusan dan penerapan kebijakan, atau mendorong pembaruan strategi. Jika tidak ada proses yang tangkas dari suatu organisasi maka tidak akan mampu melaksanakan tugas yang diperlukan meskipun individu dalam organisasi tersebut mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya (*able people*). Bahkan ketika terdapat proses yang telah ditetapkan, proses tersebut perlu dibuat ringkas dan tangkas melalui proses peninjauan dan perancangan ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses tersebut

mampu mencapai hasil inovasi yang diinginkan dan tidak menjadi ketinggalan jaman karena perubahan keadaan dan perubahan teknologi.

Terdapat tiga kemampuan kognitif agar *able people* betul-betul berdaya dalam melakukan inovasi pada pendekatan tata kelola yaitu berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir menyeluruh (*thinking across*). Pertama, pemerintah harus berpikir ke depan untuk memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi negaranya dan menerapkan kebijakan yang memungkinkan masyarakatnya mengatasi potensi ancaman dan memanfaatkan peluang baru yang ada seperti pembaruan dalam perizinan investasi. Kedua, gejolak dan perubahan lingkungan dapat membuat kebijakan-kebijakan di masa lalu menjadi ketinggalan zaman dan tidak efektif meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah dipilih dengan hati-hati apalagi kebijakan bidang investasi dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali kebijakan dan program yang ada untuk menilai apakah masih relevan dengan agenda nasional dan kebutuhan jangka panjang investor. Kebijakan dan program kemudian harus direvisi agar dapat terus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan penting. Ketiga, dalam ekonomi pengetahuan baru, kelangsungan hidup memerlukan pembelajaran dan inovasi terus-menerus untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang baru. Artinya, pemerintah perlu berpikir lintas negara dan wilayah dalam mencari ide dan praktik menarik yang dapat disesuaikan dan dikontekstualisasikan dengan lingkungan domestiknya dalam hal investasi.

Ketika pemerintah mengembangkan kemampuan berpikir berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir ulang (*thinking again*), dan berpikir menyeluruh (*thinking across*) dan menanamkannya ke dalam jalur, kebijakan, terkait sumber daya manusia (*able people*) dalam aspek tata kelola, dan perbaikan proses bisnis (*agile process*) di lembaga-lembaga sektor publik, maka hal ini akan menciptakan pembelajaran dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang memfasilitasi dinamisme dan perubahan pada pelayanan publik yang mempunyai daya ungkit terhadap investasi. Intinya, pendekatan tata kelola dalam inovasi dapat terjadi ketika para pembuat kebijakan terus-menerus berpikir ke depan untuk memahami perubahan dalam lingkungan, berpikir ulang untuk merefleksikan apa yang sedang mereka lakukan, dan berpikir secara menyeluruh untuk belajar dari pihak lain, dan terus-menerus memasukkan persepsi, refleksi, dan pengetahuan baru ke dalam pemerintahan. Keyakinan, aturan, kebijakan, dan struktur mereka yang memungkinkan mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. *Able people* ini mewakili faktor pendorong yang cukup signifikan dalam menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Kesiapan untuk bekerja keras, membuat perubahan dan beradaptasi dengan kebutuhan publik dalam pembaruan pelayanan publik dan dunia investasi yang semakin tidak menentu merupakan keniscayaan yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam berinovasi.

Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Dan walaupun banyak konsep yang menjelaskan mengenai inovasi, namun dalam konteks inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan investasi, paling tidak inovasi mempunyai atribut yang terdiri dari:

1. *Relative Advantage*

Keunggulan relatif adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dibandingkan dengan ide atau praktik yang akan digantikannya. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Tingkat keunggulan relatif lazim dimaknai sebagai keuntungan secara ekonomi, atau bisa juga menunjukkan prestise sosial. Sifat inovasi menentukan jenis keunggulan relatif tertentu (ekonomi, sosial, dan sejenisnya) dan bagi organisasi yang melakukan inovasi sangat berpengaruh dalam menentukan keunggulan relatif mana yang paling penting dan menjadi prioritas.

2. *Compatibility*

Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan dari organisasi yang akan mengadopsi inovasi tersebut. Suatu gagasan yang lebih kompatibel tentu akan mengurangi ketidakpastian bagi organisasi pelaksan dan lebih cocok dengan situasi yang terjadi. Kesesuaian seperti itu membantu pengambil keputusan memberi makna pada gagasan baru sehingga dianggap lebih familiar. Suatu inovasi dapat sesuai atau tidak sesuai dengan (1) nilai-nilai dan keyakinan sosiokultural, (2) ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya, dan/atau (3) kebutuhan publik akan inovasi tersebut. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. *Complexity*

Kompleksitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap relatif sulit untuk dipahami dan digunakan. Setiap ide baru dapat diklasifikasikan dalam kontinum dari hal yang sangat kompleks sampai dengan yang paling sederhana. Beberapa inovasi memiliki makna yang jelas bagi calon organisasi yang akan mengadopsinya, sementara inovasi lainnya tidak. Kompleksitas suatu inovasi dalam sistem sosial, berhubungan negatif dengan tingkat adopsi inovasi, semakin kompleks sebuah inovasi maka semakin minim inovasi tersebut untuk diadopsi. Kompleksitas mungkin tidak sepenting keunggulan relatif atau kompatibilitas bagi banyak inovasi, namun bagi beberapa ide baru, kompleksitas merupakan hambatan yang sangat penting dalam penerapannya. Dengan sifatnya yang

baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability*

Kemampuan untuk diuji adalah sejauh mana suatu inovasi dapat diujicobakan secara terbatas. Ide-ide baru yang telah diujicoba dan berhasil umumnya lebih cepat diadopsi dibandingkan inovasi yang tidak pernah teruji. Uji coba inovasi adalah salah satu cara untuk memberikan makna dan menilai pada suatu inovasi dan mengetahui cara kerjanya dalam kondisinya sendiri. Uji coba dapat menghilangkan ketidakpastian tentang ide baru. Uji coba suatu inovasi dalam sistem sosial, berhubungan positif dengan tingkat adopsi. Jika suatu inovasi diujicoba dan berhasil, maka tingkat adopsinya akan lebih cepat. Mencoba sebuah ide baru mungkin melibatkan penemuan ulang agar dapat disesuaikan sehingga suatu inovasi sebenarnya dapat diubah selama proses uji coba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. *Observability*

Kemampuan observasi adalah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Beberapa ide mudah diamati dan dikomunikasikan kepada orang lain, sedangkan inovasi lainnya sulit untuk diamati atau dijelaskan kepada orang lain. Kemampuan observasi suatu inovasi dalam suatu sistem sosial, berhubungan positif dengan tingkat adopsi inovasi tersebut. Sementara jika suatu inovasi teknologi tidak begitu terlihat oleh pengamatan memiliki tingkat observasi yang lebih rendah, dan biasanya memiliki tingkat adopsi yang relatif lebih lambat. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

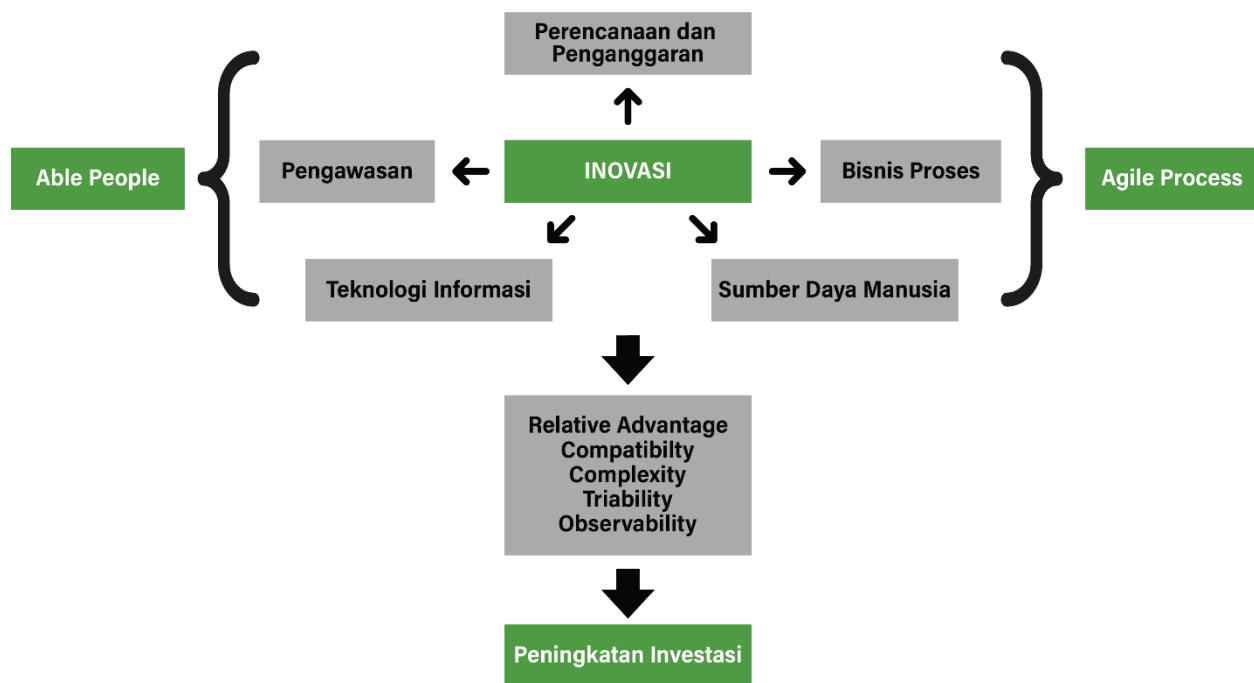
Dengan atribut seperti itu, maka inovasi merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain (Kristian dkk, 2022). Sehingga dalam konteks inilah perlu atribut yang mempunyai dampak terhadap peningkatan investasi.

B. Rekomendasi Kebijakan: Sebuah Rekomendasi Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Investasi

Masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing ekonomi. Salah satu tantangan adalah rendahnya tingkat pengeluaran untuk R&D

dan inovasi oleh pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, kekurangan infrastruktur, kurangnya pendidikan dan pelatihan, serta peraturan yang kurang jelas juga dapat menghambat kemajuan inovasi dan daya saing ekonomi. Inovasi telah menjadi kunci penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada abad ke-21 ini. Inovasi dapat merangsang terciptanya produk dan layanan baru, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing suatu negara dalam konteks ekonomi global.

Model pelayanan publik yang menjadi andalan nasional dan daerah adalah layanan terpadu yang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan utamanya bidang perizinan baik di pusat maupun di daerah. Upaya untuk dapat melakukan perbaikan layanan dimaksud adalah melalui penerapan dimensi-dimensi pelayanan publik dari aspek tata kelola sehingga inovasi pelayanan publik baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah dapat mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan investasi nasional maupun daerah. Dalam dokumen ini dapat dirumuskan sebuah model tata kelola inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan investasi oleh pemerintah sebagai berikut:



Gambar 3. Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Peningkatan Investasi

Inovasi dikenal sebagai faktor kunci yang dapat membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Teknologi dan perubahan dalam proses bisnis terbukti berdampak pada daya saing terhadap usaha yang dilakukan. Sebagian negara memilih untuk mengembangkan teknologi baru seperti yang dilakukan oleh Amerika, China dengan penelitian dan promosi inovasi. Bahkan sebagian negara

lainnya fokus pada pendanaan dan insentif seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Jerman. Dalam konteks Indonesia, kondisi yang memungkinkan dalam konteks inovasi adalah melalui pendekatan tata kelola yang baik berfokus dan mempunyai lokus pada inovasi perbaikan tata Kelola di bidang perencanaan dan penganggaran, bisnis proses, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengawasan.

Able People dan *agile process* merupakan pendorong utama tata kelola inovasi seperti yang ditunjukkan dalam kerangka kerja model inovasi pelayanan publik dalam upaya meningkatkan investasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Meskipun komitmen dan kompetensi orang-orang dalam kepemimpinan pada akhirnya menentukan efektivitas tata kelola, hal ini tidak dapat hanya bergantung pada individu tertentu. Tata kelola yang hanya bergantung pada motivasi dan kemampuan masing-masing pemimpin akan terlalu berisiko dan rentan. Kelangsungan dan keberlanjutan inovasi akan menghadapi pelbagai risiko-risiko tersebut. Tata kelola yang efektif harus dilembagakan agar berkelanjutan. Agar tata kelola inovasi dapat dilembagakan secara efektif, proses organisasi harus dirancang dan dilaksanakan sehingga sistem tata kelola tetap dapat berfungsi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Kunci untuk memahami apa yang membuat suatu inovasi dapat menjadi efektif atau tidak adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan inovasi dalam aspek tata kelola. Kualitas kompetensi pemimpin, meskipun penting untuk kinerja yang efektif dalam pelayanan publik, tapi tidak menentukan keseluruhan kapabilitas organisasi terutama dalam inovasi yang dilakukan. Kompetensi individu diperoleh dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktivitas penting. Kapabilitas organisasi tertanam dalam proses yang mengkoordinasikan, menggabungkan dan mengintegrasikan kinerja berbagai pekerja dan unit, memungkinkan pembelajaran dan penyerapan pengetahuan baru, dan mendorong konfigurasi ulang dan transformasi berkelanjutan. Oleh karena itu, kemampuan *agile process* dalam inovasi juga menjadi faktor penting yang diperlukan dalam pengembangan tata kelola inovasi.

Inovasi sebagai sebuah ide, praktik, atau obyek dianggap baru oleh individu atau institusi lain yang akan melakukan adopsi terhadap apa yang menjadi aspek kebaruan tersebut. Melengkapi rekomendasi model yang dirumuskan inovasi menekankan pada gagasan inovasi sebagai “difusi.” Argumentasi terhadap model ini bahwa inovasi dapat mencakup penemuan kembali atau adopsi ke konteks, lokasi, atau kerangka waktu lain. Inovasi sebagai proses adopsi sangat didukung oleh transfer kebijakan dan difusi kebijakan itu sendiri. Dimana inovasi pelayanan publik diartikan sebagai implementasi ide baru atau modifikasi ide yang telah digunakan dalam konteks lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam hal ini tentu dalam upaya peningkatan investasi.

Dalam proses difusi inovasi terdapat beberapa elemen pokok, salah satunya yaitu inovasi yang merupakan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subyektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka hal tersebut adalah inovasi bagi orang tersebut. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali

Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu penemuan (*invention*), difusi (*diffusion*), dan konsekuensi (*consequences*). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Sehingga dalam konteks ini sebuah inovasi tingkat keberterimaannya dalam sistem sosial atau masyarakat/publik apabila memenuhi dimensi 5 (lima) atribut yaitu *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *triability*, dan *observability*. Atribut ini mesti dipenuhi ketika inovator sudah memilih salah satu atau semua lokus atau fokus penekanan aspek dalam inovasi yang akan dilakukan. Keberterimaan inovasi akan dipengaruhi oleh pemenuhan setiap atribut dalam inovasi tersebut.

Hambatan inovasi merupakan sebuah kenicayaan yang biasa dihadapi oleh organisasi publik. Faktor-faktor yang turut juga memengaruhi keberhasilan dan kegagalan inovasi diantaranya kapasitas birokrasi dan ketersediaan anggaran, dukungan politik pemerintah, peran kepemimpinan, keberadaan sumber daya manusia yang berbakat dan tingkat pengetahuan dan keterampilan. Dan, bisa juga inovasi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sistem *reward* and *punishment* belum jelas. Sehingga pemenuhan aspek dalam atribut inovasi merupakan faktor penting dalam difusi inovasi. Untuk merespon hal tersebut, strategi sekaligus tawaran solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam inovasi, dapat dilakukan dengan menggalakkan *collaborative governance* termasuk di dalamnya *collaborative innovation*, yang melibatkan interaksi berbagai aktor dalam proses inovasi, meningkatkan kapasitas organisasi dengan melakukan berbagai pembenahan baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang bersangkutan, seperti pengelolaan anggaran, kualitas SDM, dukungan politik dan peran kepemimpinan, akuntabilitas, dan legitimasi kepercayaan masyarakat.

Inovasi proses telah mendominasi inovasi pelayanan publik di Indonesia, yang jumlahnya terus meningkat, sementara inovasi yang bersifat tata kelola jarang ditemukan. Berbeda dengan inovasi proses yang menekankan pada proses bisnis internal untuk memberikan layanan, inovasi tata kelola memerlukan kolaborasi dan interaksi dengan pihak lain. Sebagaimana disarankan dalam model ini bahwa kolaborasi penting dalam inovasi sektor publik, Seperti beberapa contoh praktik terbaik dalam inovasi. Sebagian besar kesuksesan terjadi karena adanya kolaborasi dengan pelbagai aktor yang terkait dalam pelayanan publik sehingga mempunyai daya ungkit yang maksimal terhadap peningkatan investasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi,

serta arah kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam inisiatif inovasi sektor publik yang mempunyai lokus dan fokus pada dimensi tata kelola.

BAB V

PRAKTIK DAN PEMBELAJARAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG INVESTASI

A. SiBakul Jogja

“SiBakul Jogja” merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha sedangkan JOGJA adalah kata populer dari Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “SiBakul Jogja” merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi: Pendataan dan Klasterisasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Pembinaan UKM, dan Inovasi Fasilitas Penguatan UKM. “SiBakul Jogja” juga sebagai pusat data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pemerintah Daerah DIY dimana seluruh kegiatan Pembinaan Koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib terintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja, sehingga data riil UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat Postur Kekuatan UMKM, sehingga kegiatan Pembinaan UMKM dapat diarahkan secara tepat efektif dan berdampak.

Program bernama “SiBakul Jogja” merupakan salah satu inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY dan dibina langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD-DIY, 2021). Dinas Koperasi dan UKM DIY 2019 meluncurkan program inovatif bernama SiBakul Jogja untuk mendata UMKM se-DIY agar dapat dibina dan diintegrasikan secara tertib dan terarah. Memasuki tahun kedua yaitu Tahun 2020 dimana terjadi Pandemi Covid-19, dilakukan perubahan program kegiatan dengan penambahan fitur gratis ongkir di MarketHUB. Seiring berjalannya waktu, pada tahun ketiga dan keempat yang sudah memasuki masa transisi menuju era pasca pandemi Covid-19 tentu terus mengalami proses inovasi yang terus berlangsung.

Program “SiBakul Jogja” yang dikeluarkan oleh DKUKM DIY memiliki beberapa koordinator khusus dalam mengoperasikan aplikasinya. Misalnya saja terkait pendataan UMKM se-DIY, fitur MarketHUB memiliki sembilan layanan pelanggan, dan “SiBakul Jogja” sendiri juga memiliki koordinator layanan pelanggan atau SiBakul IT CS. Program SiBakul Jogja memberikan wadah atau fasilitas bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya khususnya pada fitur MarketHUB. DKUKM DIY juga menjalin kerja sama dengan layanan pengiriman produk seperti JogjaKita, Grab, Gojek, dan Toko. Inovasi ini telah mendorong para pelaku UMKM di DIY untuk lebih mengembangkan dan memulihkan perekonomian stabilitas pasca Pandemi Covid-19. Pelaku UMKM bisa memasarkan kembali produknya langsung di kawasan wisata di Yogyakarta. Dan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemasaran secara *online* melalui *marketplace* dari “SiBakul Jogja”.

Rintisan pembinaan KUMKM di DIY sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, ketika pada tahun 2014 dikenalkan Kelas Bisnis Selasa Pagi (KBSP), sebuah forum untuk memberikan pelatihan atau ruang konsultasi bagi pelaku usaha dengan konsultan yang dibina Dinas Koperasi UKM DIY. Hanya saja, pada perkembangannya, skema KBSP belum dapat mengatasi problematika substantif dalam pemberdayaan KUMKM, seperti: dominannya para pelaku usaha mikro, namun tidak tersedia data riil; pembinaan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang tidak terstruktur dan terarah; serta pemasaran produk UMKM yang stagnan terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19. Sehubungan itu, muncul gagasan inovasi untuk membangun sistem pendukung tata kelola pembinaan KUMKM yang terstruktur dan terarah melalui klastering dan kurikulum, sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk KUMKM.

Sehingga KBSP bertransformasi menjadi sistem berbasis web yang dikenal sebagai “SiBakul Jogja”. Sebuah inovasi dengan membangun sistem tata kelola pembinaan KUMKM yang terstruktur dan terarah melalui klastering dan kurikulum, sekaligus membuka akses pasar baru bagi produk KUMKM. Harapan yang ingin dicapai adalah (1) menjadikan SIBAKUL JOGJA sebagai jembatan pemasaran produk UMKM secara cepat, murah, mudah, dan akuntabel; (2) berkembangnya UMKM melalui pembinaan berdasarkan klastering, agar UMKM naik kelas; (3) terdatanya UMKM *by name by address*; dan (4) berkembangnya koperasi menjadi koperasi berkualitas dan modern, yang tetap eksis di era digital.

Untuk klastering UMKM, dilakukan dengan *self-assessment* oleh pelaku usaha sendiri saat mendaftar melalui sibakuljogja.jogjaprovo.go.id. Penilaian oleh sistem menitikberatkan pada aspek SDM, kelembagaan, produksi, tatakelola keuangan, pemasaran, dan digital marketing. Sedangkan klastering ditentukan berdasarkan hasil penilaian kesehatan dan pemeringkatan. Data yang diperoleh digunakan sebagai acuan pembinaan yang dilakukan menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Adapun terhadap pengawasan koperasi, aplikasi tersebut telah memiliki menu penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi, sehingga semua koperasi mendapat kesempatan dinilai sebagai dasar pembinaan untuk memantau ketertiban koperasi.

Selain itu, “SiBakul Jogja” juga berkembang dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak pandemi Covid-19 melalui Sibakul Markethub. Dengan adanya Sibakul Markethub akan menambah kepercayaan diri UMKM bertransaksi online. Saat ini anggota SIBAKUL JOGJA sudah mencapai lebih dari 300 ribu dalam kurun kurang dari 2 (dua) tahun. Bahkan, hingga pertengahan Juni 2021, skema markethub yang dijalankan sudah terdapat lebih dari 43 ribu transaksi dengan nilai ongkir mencapai Rp 1 milyar. Nilai tersebut sudah menggerakkan transaksi ekonomi lokal sebesar hampir 7 kali lipatnya atau setara dengan Rp 6,8 milyar yang sudah diputar oleh para pelaku usaha mikro kecil. Peningkatan pemasaran produk KUMKM, akan secara langsung berimbas pada

peningkatan pendapatan masyarakat yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

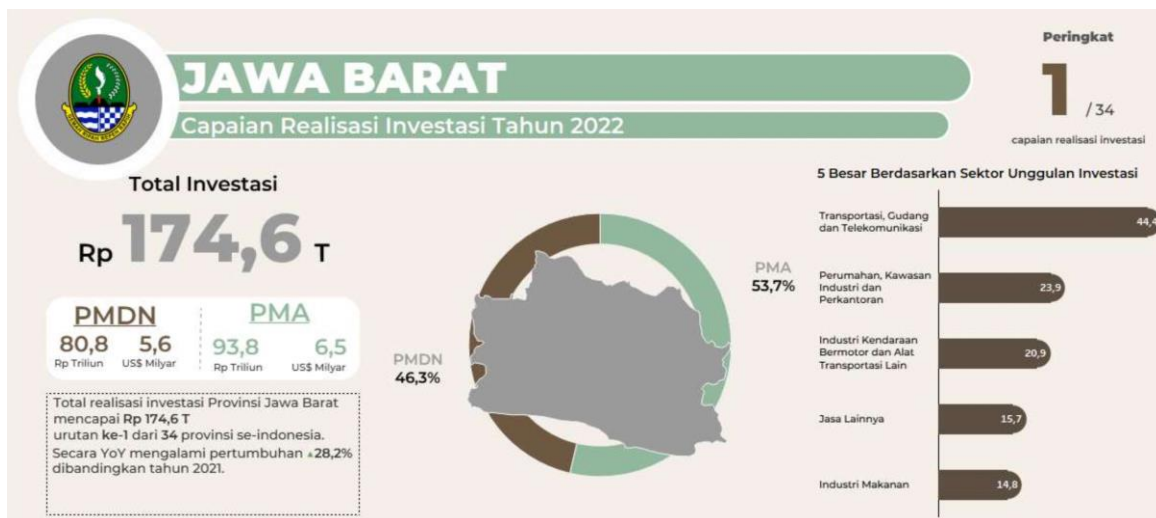
Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY melalui Program “SiBakul Jogja” dengan pengembangan fitur-fitur baru didalamnya merupakan wujud inovasi dari dimensi kesiapan SDM dan proses bisnis yang dimiliki secara terus menerus serta sangat adaptif dengan keadaan. Aplikasi “SiBakul Jogja” untuk menyambut era transisi dari pandemi ke endemic merupakan bukti bahwa aspek kesiapan sumber daya manusia, kesiapan aspek perencanaan dan finansial, dan kesiapan Teknologi Informasi dalam tata Kelola inovasi yang terjadi. Kesuksesan inovasi “SiBakul Jogja” yang awalnya hanya sebagai pusat data UMKM hingga akhirnya menjadi wadah bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produk, pengembangan usaha, menambah pengetahuan dan wawasan dalam berbisnis digital, dan lain sebagainya (Nurmaghfiroh & Atmojo, 2023).

B. Invest Bandung

Implementasi inovasi Invest Bandung merupakan terobosan baru dalam pelayanan publik bidang penanaman modal. Hal ini sebagai respon cepat dan konkret pemulihan ekonomi yang memerlukan upaya luar biasa pada masa pandemi, serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung pasca pandemi. Kolaborasi dilakukan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, pelaku usaha swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan media dalam rangka pengkajian potensi dan peluang penanaman modal, pengembangan sistem, penyelenggaraan event dan fasilitas promosi, penyebarluasan informasi, serta peningkatan pelayanan perizinan berusaha. Banyak aspek kebaruan yang coba diperkenalkan melalui Invest Bandung ini yaitu aspek kolaboratif, interaktif, dan inovatif. Di sisi lain, potensi replikasi juga terdapat dalam inovasi ini yaitu potensi kolaborasi berupa event promosi Bersama dan layanan berbantuan bagi pelaku usaha dari daerah lain, potensi replikasi atau adaptasi sistem informasi yang mudah dioperasikan dan diintegrasikan, dan terdapat kesepakatan bersama dalam pengembangan potensi daerah dan pelayan publik dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.

Dampak inovasi ini telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 80,17 poin pada Tahun 2019 menjadi 86,14 poin pada Tahun 2021. Inovasi ini juga berhasil meningkatkan nilai realisasi investasi di Kota Bandung dari Rp. 6,3 triliun pada Tahun 2019 menjadi Rp. 11,4 triliun pada Tahun 2021. Bahkan pada Tahun 2022 Jawa Barat merupakan Provinsi paling tinggi investasi PMDN maupun PMA nya yaitu sebesar Rp 174,6 Triliun, Kota Bandung ada di peringkat 6 (enam) baik PMDN maupun PMA dengan nilai investasi masing-masing Rp 3.932.864 dan 268.860 USD. Dan, Tahun 2021 yang lalu realisasi PMDN Kota Bandung merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp 8,9 Triliun. Hal ini merupakan implikasi atas strategi berkelanjutan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023, Perumusan RUPM dan Raperwal Kemudahan Penanaman Modal, Kerjasama dengan Pemkot dan Pemkab lain, dan Mendorong kemitraan usaha besar dan UMKM.



Gambar 1. Capaian Investasi Jawa Barat 2022
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2023

Kesesuaian kategori upaya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan peningkatan kemudahan berinvestasi bagi seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha melalui Inovasi Invest Bandung termasuk tindak lanjut dari kebijakan mendorong pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini telah diinternalisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, khususnya Tujuan ke-8 (delapan) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Strategi Promosi dan Kerjasama investasi telah dilakukan dalam upaya mencapai misi ke 3 dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dimana tujuannya adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi kota maju berkelanjutan dan berkeadilan, yang mempunyai sasaran untuk meningkatnya perekonomian kota. Inovasi Invest Bandung ini telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi investor dan dunia usaha dengan nilai investasi berskala nasional yang meningkat hampir 40%.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu kontribusi Invest Bandung yang bertujuan untuk mengembangkan iklim investasi Kota Bandung. Dukungan perkembangan struktur ekonomi kota Bandung yang didukung oleh sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Invest Bandung yang mempunyai sasaran untuk meningkatnya keterbukaan data dan informasi, meningkatnya minat untuk berinvestasi, dan meningkatnya kepuasan masyarakat telah direpresentasikan melalui fitur potensi investasi per-wilayah, potensi per-sektor, peluang investasi, peta spasial, interaksi dan konsultasi, dan informasi terintegrasi. Potensi

investasi yang berkembang di Kota Bandung juga terletak pada sektor perdagangan dan jasa. Dalam inovasi invest Bandung ini, semua aspek dalam tata Kelola telah melibatkan hampir semua aspek inovasi yang dilakukan yaitu kesiapan SDM, perencanaan dan penganggaran, Teknologi Informasi dan juga bisnis proses yang ada. Disamping mempunyai kesiapan dalam pengelolaan karena memiliki *able people* dan *agile process* yang telah dipahami dengan baik oleh Pemerintah kota Bandung, proses difusi inovasi dari Invest Bandung tersebut juga dipermudah dengan ketersediaan aspek ketenagakerjaan, yaitu jumlah tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi cukup; aspek kelembagaan yang berkaitan dengan penciptaan iklim investasi karena sudah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi, dan aspek infrastruktur cukup tersedia di Kota Bandung.

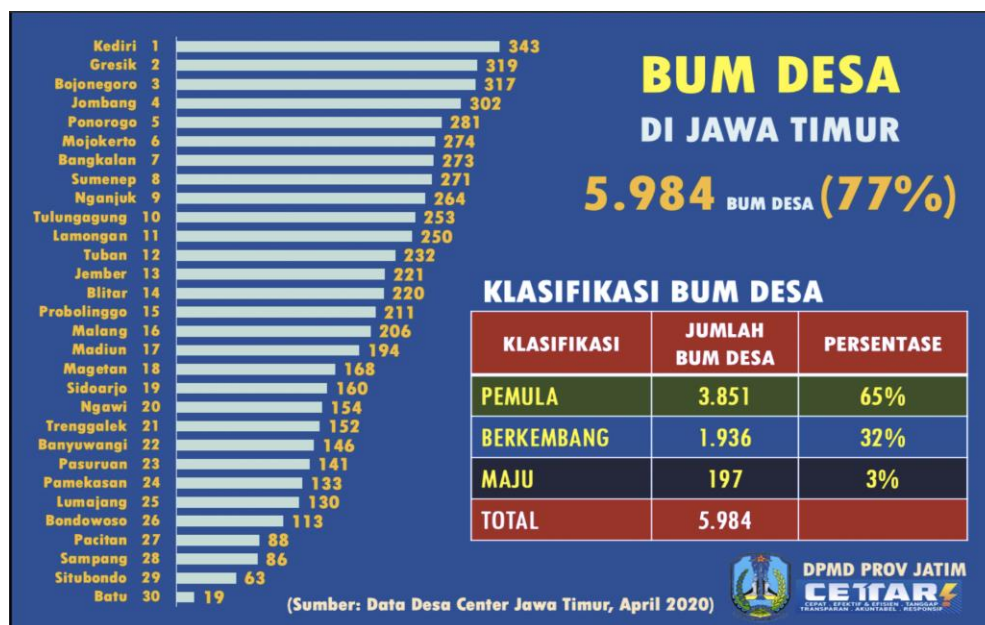
C. Klinik BUM Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memperkenalkan sistem informasi terintegrasi dan manajemen data desa berbasis komputer dan situs web di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan publik yang dinamakan Klinik BUM Desa (Budiantoro, dkk). Inovasi Klinik BUM Desa merupakan implementasi Program Jatim Berdaya dalam Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Inovasi ini merupakan pendekatan paripurna dalam pembinaan BUM Desa di Jawa Timur. Klinik BUM Desa dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di Jawa Timur per September 2019 sebesar 4,06 juta jiwa (10,20%), kemiskinan perdesaan 2,62 juta jiwa (14,16%) dan ini dua kali lipat kemiskinan perkotaan sebesar 1,44 juta jiwa (6,77%).

Inovasi ini juga menjawab permasalahan BUM Desa di Jawa Timur, yaitu: (1) *Database* BUM Desa belum optimal, (2) Rendahnya permodalan BUM Desa, (3) Lemahnya kapasitas SDM pengelola BUM Desa, (4) Pembinaan BUM Desa belum berkelanjutan sesuai klasifikasi BUM Desa, (5) Kurangnya sinergitas antar *stakeholders* dalam pemberdayaan BUM Desa. Inovasi Klinik BUM Desa diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui DPMD bersama beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, dan PT HM Sampoerna untuk memberikan fasilitasi pemberdayaan BUM Desa di Jawa Timur. Klinik BUM Desa diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 4 Mei 2019 pada acara Jambore BUM Desa di Boonpring Kabupaten Malang.

Klinik BUM Desa memiliki 3 langkah strategis, yaitu: (1) Pemetaan BUM Desa dilakukan secara daring melalui web <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/>; (2) Sistem pembelajaran/tutorial daring dan luring bagi pengelola BUM Desa berdasarkan klasifikasi dan kebutuhan BUM Desa; (3) Fasilitasi Pembinaan dan kerja sama pentahelix dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta, pendamping desa, dan media. Selama periode Mei 2019-Juni 2020, terjadi peningkatan

jumlah BUM Desa dengan klasifikasi Maju sebanyak 175 BUM Desa (dari 58 BUM Desa menjadi 233 BUM Desa) dan peningkatan jumlah BUM Desa klasifikasi Berkembang sebanyak 1.725 BUM Desa (dari 355 BUM Desa menjadi 2.080 BUM Desa). Lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Klasifikasi BUM Desa Jawa Timur 2020
Sumber: Data Desa Center Jawa Timur

Terwujudnya sinergitas Pentahelix dalam pembinaan BUM Desa diantaranya berupa kerjasama dengan pihak ketiga yang berdampak pada peningkatan aset dan pendapatan BUM Desa serta PADesa. Inovasi mampu memfasilitasi BUM Desa untuk menjalin kerjasama dengan PT HM sampoerna (20 BUM Desa), PT Pos Indonesia (371 BUM Desa), BNI 46 (1.341 BUM Desa), PT Mitra BUM Desa Nusantara (2 BUMDESMA), Bank UMKM Jatim (1 BUM Desa), PT. Pertamina (pendirian Pertashop di 14 BUM Desa), Tokopedia (3 BUM Desa). Saat ini Jawa Timur telah memiliki *database* BUM Desa yang terintegrasi dengan data base BUM Desa Nasional, hal ini sangat penting dalam mempercepat pengambilan kebijakan terkait pengembangan BUM Desa di Jawa Timur.

Pengembangan dan penyusunan model ideal untuk layanan terintegrasi pada sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa, melalui inovasi Klinik BUM Desa Jawa Timur merupakan solusi atas ditemukannya beberapa kendala layanan, seperti: keterlambatan proses kerja pemerintah desa dalam aktivitas pendataan sistem informasi dan kesulitan bagi masyarakat mengakses informasi tentang desa. Inisiasi dilakukan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur dalam pembuatan Sistem Informasi Layanan Digital Pemberdayaan BUM Desa yang terintegrasi. Selama ini pelayanan publik dikelola oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah perlu mempersiapkan ketersediaan sarana

prasarana, baik secara *online* maupun *offline* untuk menunjang keberhasilan dan integrasi antar-stakeholder yang matang dalam memberikan layanan ini. Inovasi atas layanan terintegrasi untuk memudahkan desa dalam beberapa manfaat, yaitu: menyusun data, informasi digital tentang kondisi objektif desa, perencanaan pembangunan desa berbasis data detail dan riil serta mengarahkan kinerja pembangunan desa terukur, sistematis, terarah dan berkelanjutan.

Keunggulan inovasi ini adalah berupa pengoptimalan peran dan potensi dari BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian desa. Layanan ini menjadi langkah konkrit yang solutif dalam memberikan layanan sistem informasi dan manajemen data perekonomian desa berbasis digital secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran serta pendayagunaan dari kebermanfaatannya guna menciptakan seluruh desa yang terdapat di Provinsi Jawa Timur menjadi tangguh dan berdikari. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dengan beberapa keunggulan, diantaranya: terpercaya, mudah diakses oleh masyarakat, penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan yang holistik, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, mampu untuk meningkatkan peran dunia usaha, mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat, dan mengembangkan secara sistematis dengan tahapan-tahapan yang terukur dan realistis. Upaya ini merupakan fokus inovasi dalam tata Kelola terutama aspek SDM dan Teknologi Informasi disamping faktor pendorong dalam adanya proses *agile* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang fokus pada persoalan yang terjadi di Desa melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD.

Sistem informasi dan manajemen data berbasis teknologi adalah bagian pengembangan dan pemberdayaan BUM Desa, Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kontribusi atas wujudnya ekonomi nasional yang berkembang dan berkeadilan. Kontribusi ini menumbuhkan kemampuan BUM Desa menjadi lembaga usaha milik desa yang tangguh dan mandiri. Kontribusi lainnya adalah pembangunan ekonomi desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan perekonomian, dan menjadi bagian pengetasan kemiskinan Ekonomi desa ditopang oleh BUM Desa. Keberhasilan BUM Desa dalam memenuhi kebutuhan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi di desa, seperti: memasarkan produk UMK milik masyarakat desa, meningkatkan dan memperdayakan masyarakat desa. BUM Desa mampu menjalankan perannya dalam lembaga ekonomi desa dengan memberikan multiplier effect dalam peningkatan aspek sosio-ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan BUM Desa dipengaruhi oleh keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menginisiasi layanan “Si Langit Bumi” dengan fokus pada layanan sistem informasi dan manajemen data ekonomi desa melalui penggunaan komputer dan website untuk mengelola BUM Desa. Inovasi dalam aspek tata Kelola juga menunjukkan bahwa kesiapan Teknologi Informasi dan kapastas SDM dalam lokus dan fokus inovasi menjadi sangat penting.

D. Paket Kebijakan Investasi

Fenomena inovasi kebijakan dapat ditemukan dalam paket kebijakan investasi di Kabupaten Pinrang atau yang lebih dikenal sebagai PaKsi. Tujuan PaKsi adalah meningkatkan realisasi investasi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan minat bagi investor. Proses Kerja Paksi Pinrang adalah memudahkan proses, meminimalkan interaksi, mengurangi waktu dan biaya, mendorong kesadaran wajib izin, iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memuaskan masyarakat agar terjadi peningkatan investasi. Inovasi ini dilakukan atas implikasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang belum memenuhi harapan masyarakat. Gagasan inovasi yang disebut PaKsi mempunyai titik tekan pada harmonisasi kebijakan dengan menghimpun 4 kebijakan (omnibus law), yakni; Kebijakan Insentif Daerah (KID), Kebijakan Kemudahan Daerah (KKD), Kebijakan PTSP, dan Kebijakan Sistem Elektronik.

Dampak PaKSi adalah mengurangi pengangguran, menambah kerjasama CSR, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak yang mendapatkan manfaat adalah; investor (PMA/PMDN), dan kelompok sosial (masyarakat miskin, pemuda, pengangguran, dan perempuan). Sementara nilai tambah Paksi adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal dan Perda Nomor 7 tahun 2021 tentang CSR. Ini merupakan kebaruan (*novelty*) pada inovasi PaKSi dibandingkan Tahun sebelumnya yang belum ada payung hukum yang kuat sehingga tidak berjalan maksimal dalam pemberian kebijakan bagi para investor. Sehingga aspek kebaruan PaKSi melakukan inovasi yang menghimpun berbagai kebijakan kedalam Paket Kebijakan Investasi yang berbentuk omnibus law daerah. Padahal inovasi ini diciptakan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan omnibus law. Berikutnya adalah inovasi ini memudahkan investor dan masyarakat mendapatkan data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi daerah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meminimalisir fenomena malpraktik pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dengan prosedur sangat birokratis, tidak transparan dalam hal waktu dan biaya, banyak pungli, serta jarak tempuh yang jauh.

Inovasi ini juga memberikan *service plus*, yaitu memberikan kemudahan dalam proses perizinan kegiatan berusaha, insentif bagi investor dalam melakukan penanaman modal, fasilitasi dalam kelancaran kegiatan berusaha, memberikan jaminan keuntungan terhadap investasi usaha. Pelayanan dilakukan dengan dukungan sistem informasi yang transparan dan akuntabel, sehingga terpercaya dan terhindar dari praktik korupsi. Keberlanjutan inovasi PaKsi dijamin melalui beberapa strategi yaitu: 1) Strategi institusional berupa penguatan regulasi atau dasar hukum implementasi dan/atau pemberlakuan Inovasi; 2) Strategi sosial berupa penguatan partisipasi/kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat karena adanya kebutuhan/kepentingan publik yang harus dipenuhi; dan 3) Strategi manajerial berupa

penguatan peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan/atau pemberlakuan SOP.

Dalam konteks inipun tata kelola dalam inovasi juga berada pada aspek SDM dan Teknologi Informasi, walau disisi yang lain inovasi kebijakan merupakan juga dimensi yang harus menjadi fokus utama ketika sebuah inovasi atas layanan publik dilakukan. Kabupaten Pinrang setiap tahun mengalami peningkatan investasi dengan nilai ± 1.7 Milyar pada tahun 2019 dan meningkat menjadi ± 1.8 Milyar pada tahun 2021. Dengan tingginya nilai investasi dan jumlah proyek yang terlaksana menunjukkan tingginya minat investor dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan di Pinrang. Jika kita lihat implikasi terhadap peningkatan investasi, secara keseluruhan Sulawesi Selatan menduduki posisi 19 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada Tahun 2022 dengan nilai investasi Rp. 14,3 T, sedangkan investasi PMA 6.780 USD dan PMDN sebesar Rp. 158.152 juta di Kabupaten Pinrang, lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini.

PMA

No	Kabkot	Investasi (US\$ Ribu)
1	Kabupaten Luwu Timur	187.981
2	Kabupaten Bantaeng	125.749
3	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	68.894
4	Kabupaten Luwu	35.658
5	Kota Makassar	31.650
6	Kabupaten Pinrang	6.780
7	Kabupaten Jeneponto	3.370

PMDN

No	Kabkot	Investasi (Rp. Juta)
1	Kota Makassar	3.483.456
2	Kabupaten Luwu	1.364.583
3	Kabupaten Maros	581.660
4	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	245.259
5	Kabupaten Luwu Timur	222.019
6	Kabupaten Bone	211.169
7	Kabupaten Gowa	194.618
8	Kabupaten Pinrang	158.152

Tabel 1. Capaian Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Pinrang

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2023

Disamping itu faktor penentu keberhasilan inovasi PaKsi adalah adanya *able people* yang mempunyai integritas tinggi terhadap tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya komitmen dukungan Bupati dan DPRD Kabupaten Pinrang dalam menyediakan pembiayaan inovasi PaKsi setiap tahunnya yang selalu dialokasi dalam dokumen anggaran kabupaten, dalam hal inipun aspek tata Kelola dalam inovasi juga telah menjadi fokus inovasi pemerintah daerah. Disamping itu dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang juga sangat kuat, sehingga investor, pelaku usaha dan masyarakat mudah mendapatkan data dan informasi tentang investasi. Solidnya kelembagaan dan staf pengelola inovasi PaKsi juga sangat hebat, sehingga pelayanan perizinan dan penanaman modal bagi investor, pelaku usaha dan masyarakat dapat diberikan dengan lebih baik.

Sementara itu dukungan investor, pelaku usaha, dan masyarakat untuk berkoordinasi terbuka dan kooperatif, sehingga terbangun hubungan saling percaya dan

kerjasama produktif. Terdapat juga dukungan LSM melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat, sehingga memahami tujuan dan arti penting inovasi PakSi. Sehingga banyak aktor berkolaborasi dalam mewujudkan PaKsi menjadi paket kebijakan yang sangat efektif di bidang investasi di Kabupaten Pinrang. Sementara itu hasil Evaluasi dilakukan untuk beberapa parameter dalam melakukan evaluasi terhadap paket kebijakan investasi ini antara lain; (1) nilai realisasi investasi, (2) realisasi jumlah proyek, (c) minat investor, dan (d) tingkat kepuasan masyarakat. Evaluasi indikator tersebut dilakukan dengan mereview laporan kegiatan dari pelaksanaan proyek investasi, dan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). dimana SKM Tahun 2019 : 88 (sangat Baik), dan Tahun 2021 ; 94 (sangat Baik). Sehingga dapat dipastikan bahwa tujuan dari PaKsi ini untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah dapat tercapai dengan efektif di Kabupaten Pinrang, sehingga dalam hal ini telah mencapai aspek tujuan dan inovasi.

Paket kebijakan investasi yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini dapat diidentifikasi dengan melalui beberapa aspek, yaitu: Invention merupakan kemampuan dalam melakukan sebuah penemuan akan suatu hal yang original atau benar-benar baru hasil buatan manusia yang belum pernah ada sebelumnya. Invention ini dapat berupa alat ataupun gagasan baru dari kreativitas berdasar hasil pengamatan atau pengalaman. Hal ini terbukti sebelum adanya omnibus law, Pemerintah Kabupaten Pinrang sudah memulai terlebih dahulu. Terdapat juga program yang terencana. Suatu inovasi pelayanan publik harus dilaksanakan melalui sebuah program yang terencana dimana sebuah inovasi dilaksanakan melalui proses yang jelas, direncanakan terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang. Program terencana ini harus melalui dan menyelesaikan tiga tahapan dalam pembuatannya yaitu tahapan pembuatan atau perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Sehingga Inovasi dapat dikatakan sudah pantas untuk digunakan oleh masyarakat; Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pinrang dari sisi kebijakan telah ada dan terdapat jaminan anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albury, D. (2005) Fostering Innovation in Public Services, *Public Money & Management*, 25:1, 51-56
- Arundel, A., & Huber, D. (2013). From too little to too much innovation? Issues in measuring innovation in the public sector. *Structural change and economic dynamics*, 27, 146-159.
- Budiantoro, R. A., Kharismaputra, A. P., & Sehabuddin, A. (2023). INISIASI SISTEM DAN MANAJEMEN DATA PEREKONOMIAN DESA, MELALUI PENGELOLAAN BUMI DESA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 6(2), 123-137.
- Budiarto, A., & Susanti, S. (2017). Pengaruh financial literacy, overconfidence, regret aversion bias, dan risk tolerance terhadap keputusan investasi (studi pada investor PT. Sucorinvest central gani galeri investasi BEI universitas negeri surabaya). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 5(2), 1-9.
- Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public service innovation: a typology. *Public Management Review*, 22(11), 1674–1695. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1645874>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denhardt, Janet V., dan Robert B. Denhardt, 2013. *Pelayanan Publik Baru: Dari Manajemen Steering Ke Serving*. Kreasi Wacana
- Dewi, M. (2009). Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap output sektor industri di Kabupaten Bekasi.
- Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R. (2005). On the differences between public and private innovation.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Haming, M., & Basalamah, S. (2010). *Feasibility Study of Project and Business Investment*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Holstein, James A., & Gubrium, Jaber. (2009). Phenomenologists, Ethnomethodologists, dan Praktik Interpretif. In Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (Eds), *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jogiyanto, H. M. (2002). *Sistem Teknologi Informasi, Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar. Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Krammer, S. M. (2017). Science, technology, and innovation for economic competitiveness: The role of smart specialization in less-developed countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 123, 95-107.
- Kristian, I., Wulandari, R. A., & Prihaningsih, R. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Investasi di Daerah. *Panengen: Journal of Indigenous Knowledge*, 1(1), 32-41
- Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 7 No. 1, 15-25.
- Mahpudin, M. (2022). Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6 (2), 107–117.
- Maimunah, S., & Hilal, S. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(2), 42-49.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. (2008). *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches (Ed. 7th)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Nurmaghfiroh, E. F., & Atmojo, M. E. (2023). Analysis of the Preparedness of the Sibakul Jogja Program as a Post-COVID-19 Economic Strengthening Effort for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 37-50.
- Levi-Faur, David, 'Jack L. Walker, "The Diffusion of Innovations among the American States"', in Martin Lodge, Edward C. Page, and Steven J. Balla (eds), *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration*, Oxford Handbooks (2015; online edn, Oxford Academic, 7 July 2016), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.6>
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Queyroi, Y., Carassus, D., Maurel, C., Favoreu, C., & Marin, P. (2020). Local public innovation: an analysis of its perceived impacts on public performance. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852320963214>.

- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2019). Diffusion of innovations. In An integrated approach to communication theory and research (pp. 432-448). Routledge.
- Rubin, A. and Babbie, E.R. (2008) Research Methods for Social Work. Brooks/Cole, Belmont.
- Santoso, R. Y. P., & Widodo, H. (2021). The Reaction Of The Indonesian Capital Market When Indonesia Experiences Recession In 2020. *Academia Open*, 5, 10-21070.
- Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and innovation in public sector services: The case of the digital library. *Government Information Quarterly*, 33(2), 237-249.
- Sutha, I.P.G.A. (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Tandelilin, E. (2010). Work Motivation Between Women Entrepreneurs and Female Employees in Surabaya.
- Yurynets, Z., Bayda, B., & Petruch, O. (2015). Country's economic competitiveness increasing within innovation component. *Економічний часопис-XXI*, (9-10), 32-35.

